



EXIT MEETING HASIL EVALUASI SEMENTARA REFORMASI BIROKRASI & AKIP



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jakarta, 31 Oktober 2018

Your Logo or Name Here

PRINSIP PENILAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

➔ Perbaikan berkelanjutan

Hasil penilaian digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi secara terus menerus, melalui siklus rencanakan, laksanakan, monitoring dan evaluasi serta lakukan perbaikan

➔ Kejujuran dalam penilaian

Untuk memotret/menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara akurat sesuai dengan kondisi yang senyatanya dalam praktik, diperlukan kejujuran dalam melakukan penilaian.

Rekayasa/ketidakjujuran justru tidak akan dapat memberikan informasi mengenai perbaikan-perbaikan berkelanjutan yang harus dilakukan.

➔ Terdokumentasikan

Seluruh proses pelaksanaan reformasi birokrasi harus didokumentasikan dengan baik sesuai dengan siklus rencanakan, laksanakan, monitoring dan evaluasi serta lakukan perbaikan.

➔ Pembuktian oleh *Stakeholder*

Stakeholder dilibatkan dalam survey eksternal (pelayanan publik dan persepsi korupsi) dan survey internal sehingga muncul pengakuan terhadap RB yang telah dilaksanakan

CATATAN PENTING !!!

➔ **SIMPULAN SEMENTARA**

Hasil penilaian ini masih sementara berdasarkan verifikasi lapangan dan data tambahan yang diserahkan ke tim Evaluator.

Nilai akhir akan ditetapkan pada saat panel evaluator.

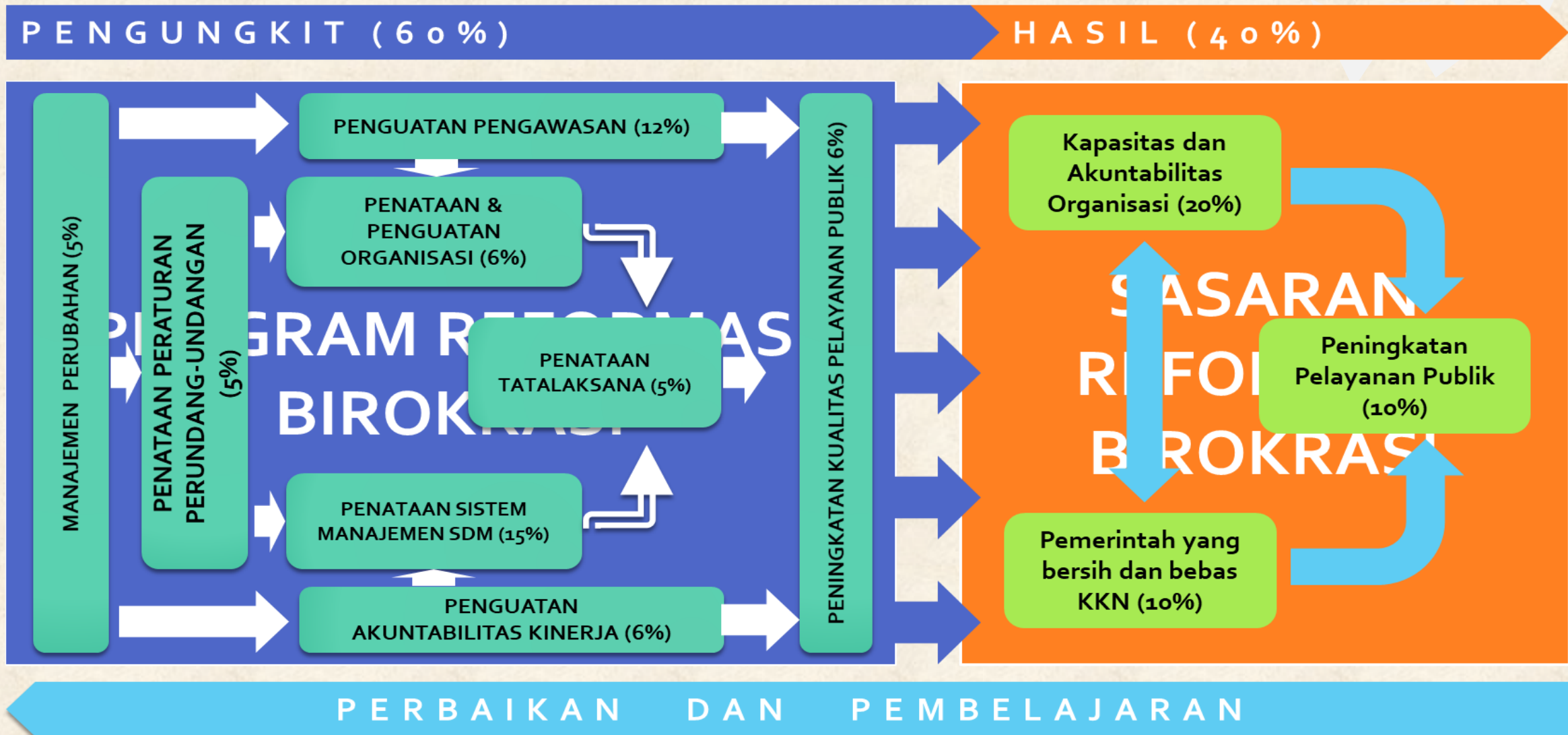
➔ **MASIH TERBUKA UNTUK PERBAIKAN**

Badan Pengawas Obat dan Makanan masih memiliki kesempatan yang terbuka untuk melakukan perbaikan/penyempurnaan yang akan dapat merubah penilaian ini, sampai dengan saat panel evaluator berakhir. Diperkirakan panel evaluator baru akan dimulai pada pertengahan November 2018 dan prosesnya dilakukan dalam beberapa tahap.

➔ **SAMPAI SAAT SEBELUM CLOSING**

Penyerahan data perbaikan/penyempurnaan masih dapat diterima sebelum closing pembahasan panel evaluator. Untuk itu komunikasi pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan tim evaluator tetap diintensifkan.

KERANGKA LOGIS EVALUASI RB



**KEKURANGAN/KELEMAHAN ATAS
KOMPONEN PENGUNGKIT PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI
YANG PERLU SEGERA DISEMPURNAKAN**

1. Penataan Manajemen Perubahan

- Kondisi :

1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi disampaikan tepat waktu;
2. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti antara lain :
 - a. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di tingkat Balai Besar POM maupun Balai POM di 16 propinsi
 - b. Membentuk tim kerja pembangunan Zona Integritas BBPOM Bandung
 - c. Menyusun Rancangan pedoman pelaksanaan RB di unit kerja

Penataan Manajemen Perubahan

3. Telah menyusun rancangan strategi komunikasi internal yang merupakan strategi untuk menyampaikan pesan komunikasi kepada seluruh pegawai di lingkungan BPOM dengan konten/isi pesan utama sebagai berikut:

- Informasi terkait Nilai (Value) organisasi dan budaya organisasi BPOM
- Informasi terkait Visi, Misi, Sasaran, Rencana Strategis, dan Arah Kebijakan BPOM
- Informasi terkait Kebijakan Pimpinan BPOM
- Informasi terkait Reformasi Birokrasi di BPOM
- Informasi terkait dengan program/kegiatan di lingkungan BPOM yang bersifat Nasional atau Internasional

1. Penataan Manajemen Perubahan

Hal Hal yang masih perlu perbaikan :

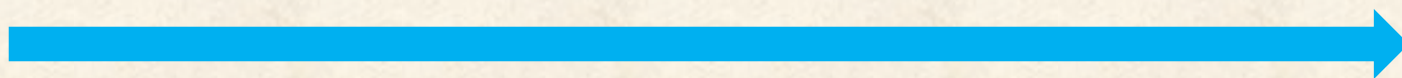
1. Website www.pom.go.id belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menyampaikan keberhasilan pelaksanaan RB;
2. Pemilihan program Quick wins belum diketahui apakah program lama yang ditingkatkan kualitas pelayanannya atau program baru karena esensi dari quickwins adalah memenuhi harapan pemangku kepentingan utama atas perbaikan pelayanan;
3. Hasil pemetaan terhadap adanya resistensi ASN sebesar 8,73% terhadap perubahan/Program Reformasi Birokrasi perlu ditindaklanjuti dengan pembinaan/pelatihan dan perlu diulang/dievaluasi mengingat survey terakhir dilaksanakan pada 2016;
4. Membentuk tim RB di seluruh BBPOM/BPOM propinsi serta membuat pelaporannya;

1. Penataan Manajemen Perubahan

- Hal Hal yang masih perlu perbaikan :
5. Sesuai Permenpan 27 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan, setiap agen perubahan harus membuat rencana tindak berdasarkan nilai organisasi, perubahan apa yang ingin dicapai dan rencana tindak lanjutnya. Membentuk forum agen perubahan untuk saling sharing knowledge pengalaman tentang keberhasilan melakukan perubahan di unit kerja masing2.

Contoh Formulir Rencana Tindak area manajemen perubahan

NO.	NILAI ORGANISASI	PERUBAHAN YANG INGIN DICAPAI			RENCANA TINDAK		KET
		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	WAKTU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)



2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

- Kondisi:
 1. “BPOM telah melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian besar peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron. Identifikasi dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan;
 2. “Memiliki Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

- Saran:

1. Mendorong percepatan penyelesaian RUU Pengawasan Obat dan Makanan;
2. Memperkuat sinergi dengan Dinas Kesehatan dengan menyusun kebijakan/regulasi/pedoman/NSPK (Norma Standar Prosedur, Kriteria) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

- Kondisi Saat ini:

1. Telah dilakukan evaluasi penataan organisasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan BPOM:
 - a. Perpres 80/2017 tentang BPOM
 - b. Persetujuan Prinsip hal Rancangan Peraturan Kepala BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM
 - c. Peraturan BPOM 26/2017 tentang OTK BPOM
2. Telah dilakukan evaluasi penataan organisasi pada seluruh UPT di lingkungan BPOM:
 - a. Persetujuan Prinsip sesuai Surat Menteri PANRB Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Penataan UPT BPOM
 - b. Peraturan BPOM 11/2018 tentang Kriteria Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM,
 - c. Peraturan BPOM 12/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM,

- Kondisi Saat ini:
- 3. Dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja:
 - a. Evaluasi Program Kegiatan Indikator dan Target
 - b. Dokumen hasil kesepakatan 3 pihak (Trilateral Meeting) antara Bappenas, Kemenkeu, dan BPOM tanggal 11 April 2018 dalam rangka Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPOM tahun 2018
- 4. Dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain:
 - a. Inpres 3/2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan,
 - b. Keputusan Kepala BPOM No.HK.04.1.21.01.17.0013 Tahun 2017 tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Perpres tentang BPOM
 - c. Penyusunan Perpres 80/2017 tentang BPOM dilakukan oleh PAK/LPNK yang terdiri atas BPOM, Kemenkumham, Kemenkes, Kemenkeu, Setkab, dan Setneg.
- 5. BPOM telah melakukan evaluasi kelembagaan sesuai Permen PANRB 20/2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (tingkatan organisasi tertinggi dan tingkatan satu tingkat di bawah organisasi tertinggi) tanggal 6 September 2018

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

- Perlu menjadi Perhatian:

Evaluasi:

1. Pengajuan perubahan organisasi sebaiknya disampaikan berdasarkan analisis yang dihasilkan sebagai bentuk evaluasi secara berkala yang juga menggambarkan komitmen perwujudan kelembagaan yang ideal, tepat fungsi, dan adaptif.
2. Beberapa Dinas Kesehatan memiliki fungsi pengawasan obat dan makanan seperti Dinkes Kab Bandung, Dinkes Propinsi Sulawesi Tenggara
3. Analisis untuk pembentukan unit kerja dengan pendekatan *performance based organization dengan performance yang berorientasi outcome sesuai dengan kinerja yang akan dihasilkan*

4. Tatalaksana

- Hal Hal yang sudah baik:

1. Dalam membangun koordinasi yang baik antar unit kerja, BPOM telah menerapkan peta proses bisnis bersertifikasi ISO 9001;2015, peningkatan kualitas pelayanan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektifitas organisasi.
2. Mengelola e-government dengan baik sebagai bukti komitmen dalam memberikan layanan internal organisasi maupun masyarakat/pelaku usaha, dalam kecepatan dan kualitas pelayanan

4. Tatalaksana

- Hal Hal yang masih perlu perbaikan :
 1. Mengembangkan inovasi e-government dalam upaya peningkatan dan kemudahan layanan sesuai tugas fungsi organisasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan.

5 Penataan SDM

- Rekomendasi
 1. Beberapa dokumen ada yang sifatnya masih berupa draft, sehingga perlu diselesaikan seperti draft peraturan terkait dengan penataan manajemen SDM yang belum selesai, antara lain Draft Surat Sestama tentang Penyampaian SK penempatan dan Penghitungan Kembali ABK dan Peta Jabatan; Draft Aturan BPOM Th. 2018 tentang Ketentuan Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan BPOM
 2. Perlu membangun mekanisme pola karir dan menerapkan pengembangan pola karir secara transparan, sehingga memungkinkan bagi pegawai yang berada di daerah untuk mendapatkan promosi di pusat
 3. Beberapa dokumen ada yang sifatnya masih berupa sebagian dan belum keseluruhan unit yang memiliki atau mengimplementasikan sehingga perlu untuk dikembangkan terlebih dahulu agar benar-benar seluruh unit sudah memiliki atau mengimplementasikan dokumen tersebut, seperti Standar Kompetensi Jabatan Mengacu pada permenpan Nomor 38/2017 untuk Kedeputian IV

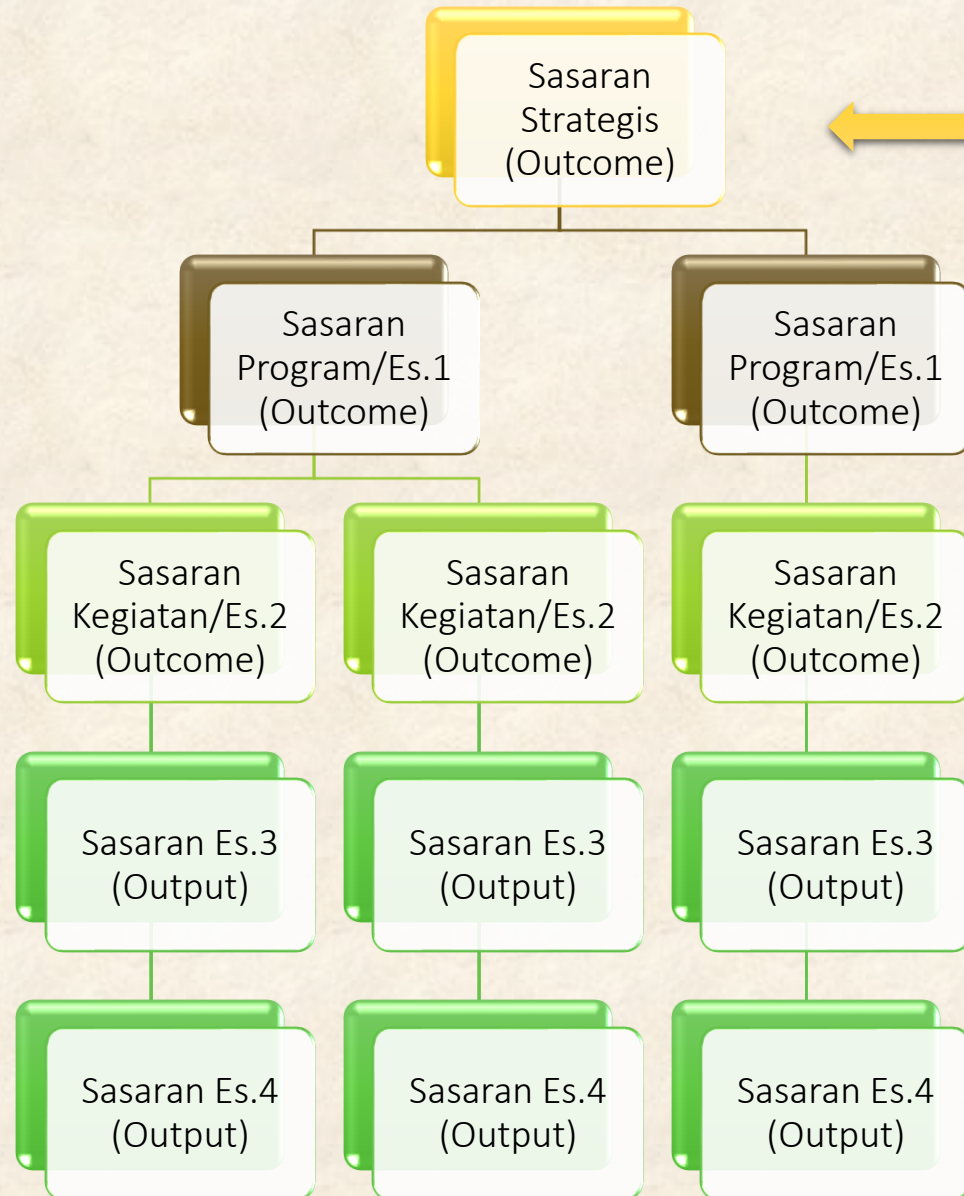
5 Penataan SDM

- Rekomendasi
4. Hasil seleksi terbuka belum diumumkan sesuai dengan tahapan seleksi dan tidak menyampaikan nilai kepada pihak yang bersangkutan pada setiap tahapan seleksi;
 5. Pengisian lowongan jabatan diupayakan secepat mungkin sehingga pelaksana tugas jabatan (Plt) tidak terlalu lama dalam mengemban tugas.

6. Penguatan Akuntabilitas

1. Berdasarkan pemantauan melalui aplikasi esr.menpan.go.id, BPOM telah menyampaikan dokumen akuntabilitas kinerja seperti Dokumen IKU, Renstra, PK, dan Laporan Kinerja Badan serta Eselon 2 (Perwakilan).
 - Namun, justru dokumen SAKIP Eselon 1 belum disampaikan.
 - Telah dibangun aplikasi e-performance melalui e-performance.pom.go.id yang menggambarkan peta strategis level 0, 1, dan 2. Juga sasaran kinerja berikut indikatornya untuk dimonitor setiap triwulanan.
2. Terkait dengan rumusan hasil dan ukuran kinerja yang telah diperbaiki, juga perlu dilakukan analisis hubungan/turunan kinerja pada level yang ada dibawahnya sampai ke unit kerja terkecil, bahkan sampai ke level individu (Cascading) yang akan tergambar seperti gambar pohon kinerja di slide berikut:

6. Penguatan Akuntabilitas (lanjutan...)



Terkait dengan rumusan hasil dan ukuran kinerja yang telah diperbaiki, perlu juga dilakukan analisis hubungan/turunan kinerja pada level yang ada dibawahnya sampai ke unit kerja terkecil, bahkan sampai level individu (Cascading) yang akan tergambar seperti gambar pohon kinerja di samping.

Peta strategi yang telah disusun sebaiknya dilengkapi dengan anggaran yang mendukung, sehingga melalui dokumen ini akan tergambar Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), juga menggambarkan keselarasan dalam mencapai hasil (sasaran strategis) melalui program/kegiatan yang dirasa tepat.



7. Penguatan Pengawasan

- Kondisi :

1. BPOM telah mengeluarkan kebijakan pengawasan tentang Penanganan Gratifikasi, tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), tentang Pengaduan Masyarakat, tentang Whistle Blowing System, tentang Penanganan Benturan Kepentingan, dan telah mencanangkan zona integritas. Bahkan kebijakan tersebut telah dilaksanakan dan dimonitor pelaksanaannya dengan baik.

- Saran:

1. Memperkuat pengawasan, antara lain dengan melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan/implementasi gratifikasi, whistle blowing system dan benturan kepentingan serta menetapkan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi tersebut.

8. Pelayanan Publik

- Hal Hal yang sudah baik:
 1. Menerapkan standar pelayanan yang baik pada setiap jenis pelayanan, melakukan reviu terhadap standar pelayanannya, serta informasi pelayanannya mudah diakses oleh pengguna layanan dengan berbagai aplikasi secara online. Telah memiliki unit yang mengelola pengaduan dan juga tersedia Media aplikasi.
 2. Pengelola pengaduan dengan baik, didukung media yang mudah diakses, pengaduan dikelola dengan baik oleh setiap unit layanan, sehingga Pengaduan pelayanan dari masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat,

8. Pelayanan Publik

- Hal Hal yang masih perlu perbaikan :
 1. Mengembangkan berbagai jenis pelatihan dalam meningkatkan nilai-nilai budaya pelayanan prima, dan mengimplementasikan sistem reward dan punishment, guna memberikan motivasi bagi pemberi dan pengguna layanan.
 2. Dalam upaya meningkatkan mutu kualitas pelayanan agar lebih mengembangkan survei eksternal pada setiap jenis pelayanan, menindaklanjuti hasil survei yang difokuskan pada unsur yang mendapat nilai lebih rendah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan

Nilai Pengungkit Sementara

No	Area	BOBOT	PMPRB SUBMIT	LHE 2017	NILAI SEMENTARA 2018
1	Manajemen Perubahan	5,00	4,82	3,72	4,02
2	Penataan PerUU	5,00	4,38	2,71	2,91
3	Penguatan Organisasi	6,00	5,01	4,01	4,51
4	Tatalaksana	5,00	4,67	3,92	4,14
5	Manajemen SDM	15,00	14,78	12,92	13,22
6	Akuntabilitas	6,00	5,52	4,61	4,61
7	Pengawasan	12,00	11,38	8,95	8,95
8	Pelayanan Publik	6,00	5,57	4,36	4,89
	TOTAL	60,00	56,13	45,20	47,25

Nilai pada Komponen Hasil Sementara

NO	INDEKS	NILAI	2017
1	Integritas Jabatan	3,26	
2	Internal Organisasi	3,46	
	Survei Internal Integritas Organisasi	3,36	3,41

Jumlah Responden : 103 Orang



TERIMAKASIH